

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Obyek Studi

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang didirikan sejak zaman kolonial belanda, tepatnya pada tahun 1920, mulai dipergunakan dan dihuni pada tahun 1924. Luas dari Lembaga Pemasyarakatan ini adalah 2360 m² dengan luas bangunan 1950 m². Sebagai pembatas lokasi, lembaga pemasyarakatan ini dikelilingi pagar tembok setinggi 4 meter. Lembaga Pemasyarakatan ini berlokasi di tengah-tengah kota Jombang tepatnya di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 155 Jombang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat : Jalan KH. Wachid Hasyim
- Sebelah utara : Gang Lembaga Pemasyarakatan
- Sebelah timur : Perkampungan Kelurahan Kaliwungu
- Sebelah selatan : Monumen Mastrip

Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang bernama Lembaga Pemasyarakatan Tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.01.06 Tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Selanjutnya pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 16 April 2003 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05 PR.07.03 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, yang

mana dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dijelaskan bahwasanya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yaitu untuk : ⁶²

“Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan yang ada di Jombang. Lembaga ini selain berfungsi menampung para pelanggar hukum juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dan bimbingan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Jadi meskipun seorang Narapidana kehilangan kebebasan bergerak, namun mereka bukan berarti kehilangan hak-haknya. Lembaga ini menampung sejumlah narapidana dan tahanan, sehingga ada pemisahan diantara kedua golongan tersebut, yang dinamakan dengan Blok. Untuk tahanan wanita dan narapidana wanita dijadikan satu, dikarenakan minimnya sarana yang ada.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang meliputi halaman depan, bangunan utama, halaman dalam, dan pos jaga di setiap sudut bangunan yang dibatasi tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas portir, ruang perkantoran, ruang dharma wanita, ruang rapat, ruang konseling, koperasi, gudang, dapur, serta musholla bagi petugas. Setelah melewati portir, terdapat ruang jaga, ruang kunjungan, dan taman, aula serbaguna, kamar mandi. Memasuki halaman dalam tepatnya di bagian tengah terdapat sarana seperti lapangan bulu

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

tangkis, lapangan voli, lapangan tennis, lapangan upacara dan musholla bagi warga binaan pemasyarakatan, menara air. Kamar hunian terdiri atas enam blok, yaitu tiga blok berada di sebelah barat halaman dalam dan tiga blok di sebelah timur halaman dalam, jumlah kamar dari keseluruhan blok yaitu sebanyak 33 kamar. Selain itu, sebelah utara halaman dalam terdapat pula ruang poliklinik dan gudang, sedangkan di sebelah selatan halaman dalam terdapat gudang beras dan ruang bimbingan kerja.

Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang ini, sebenarnya adalah 200 orang (dengan ketentuan 5,4 m kapasitas 1 orang). Mengingat pasang surutnya tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang ini, maka pada saat penulis melakukan penelitian pada pertengahan Februari 2016 terdapat 427 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang melebihi kapasitas yang ada, sehingga membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat.

Lembaga Pemasyarakatan dilasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas I A.
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A.
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B.

Klasifikasi tersebut di dasarkan atas kapasitas tempat kedudukan, dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan Klas I A berkapasitas 701 orang, Klas II A berkapasitas antara 251-400 orang dan Klas II B berkapasitas antara 1-250

orang. Jadi berdasarkan hal di atas, Lembaga Pemasyarakatan Jombang tergolong Klas II B, karena secara jelas terperinci jumlah kapasitasnya yaitu +250 orang.

Selama dalam pelaksanaan teknik pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang yang menampung, merawat dan membina Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan di dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pembinaan Narapidana yang mengacu pada falsafah Pancasila, dimana mereka diperlakukan sebagai individu juga diperlakukan sebagai anggota masyarakat. Artinya, di dalam pembinaan tersebut mereka tidak bisa dipisahkan hubungannya dengan masyarakat dan tidak lepas dari tanggungjawab mereka terhadap pembinaan yang dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang berfungsi untuk mengembalikan Narapidana ke masyarakat agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat, memberikan bimbingan kepada Narapidana agar bisa bertobat, memberikan bimbingan keterampilan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya bisa mandiri, memberikan pendidikan dan membina akhlak narapidana agar menjadi orang yang dapat bermasyarakat dan berbudi luhur.

2. Landasan Yuridis

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menampung, membina, dan merawat serta mendidik para pelanggar hukum atau para narapidana. Hal ini bertujuan agar para pelanggar

hukum atau para narapidana tersebut dapat menjadi warga masyarakat dan manusia yang baik, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak melanggar hukum lagi.
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, dan produktif dalam pembangunan.
3. Berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Yang berlandaskan pada dasar-dasar hukum antara lain : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

3. VISI dan MISI Lembaga Pemasarakatan Klas II B Jombang

1. VISI Lembaga Pemasarakatan Klas II B Jombang Lembaga Pemasarakatan Klas II B Jombang

Visi merupakan suatu pikiran yang melampaui pikiran realitas sekarang, sesuatu yang kita ciptakan yang belum ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah ia lami oleh organisasi sebelumnya. Organisasi perlu menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan di masa depan karena suatu visi yang menentukan suatu anggota organisasi untuk mewujudkannya. Adapun visi dari Lembaga Pemasarakatan Klas II B Jombang adalah sebagai berikut :

“Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan

didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”.⁶³

2. MISI Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Misi merupakan jalan pilihan (*the choosen track*) suatu organisasi yang menyeia kan barang / jasa bagi pelanggannya dimana perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun langkah-langkah perjalanan organisasi. Adapun misi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang adalah sebagai berikut : ⁶⁴

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada kuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder*.

4. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan searah dengan perjalanan organisasi tersebut, adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H., selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Jombang. 2 Februari 2017.

⁶⁴*Ibid.*

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan suatu organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Adapun sasaran dari penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan dan atau memelihara kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan serta barang / benda yang diserahkan pengurusnya kepada negara yaitu :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap dan perilaku.
4. Kualitas dan kuantitas ketrampilan.
5. Kualitas kesehatan jasmani dan kualitas rohani.
6. Pemeliharaan kualitas dan kuantitas barang rampasan dan benda sitaan negara.

5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting, karena dapat membantu pelaksanaan tugas dan aktifitas dalam organisasi.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang menjelaskan bahwa adanya pekerjaan struktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bapak Nur Akhmadi, Bc.,I.P.,SH yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses pendidikan dan pengajaran serta segala hal yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang. Dalam melaksanakan tugasnya, Kalapas dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam beberapa bagian seperti Kepala Bagian Satuan Pengamanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan dan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Adapun struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang sebagai berikut:

BAGAN I

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang



Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi proses penerimaan, penempatan, perawatan, keamanan dan tata tertib narapidana serta bidang fasilitas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum yang bertugas melakukan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat, perlengkapan, dan urusan rumah tangga LAPAS.
2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas melakukan urusan Kepegawaian seluruh pegawai yang ada di LAPAS dan melakukan urusan yang berhubungan dengan keuangan LAPAS.

c. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

d. Bagian Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Bertugas melakukan pembimbingan terhadap seluruh narapidana. Bagian pembimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

1. Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pencatatan dan pembuatan statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan, pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana.

3. Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

1. Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas keamanan.

2. Seksi pelaporan

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

f. Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan pembimbingan dan pelatihan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja.

1. Seksi Bimbingan Kerja

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana.

2. Seksi Pengelola Hasil Kerja

Mempunyai tugas mengelola kerja.

Untuk mengetahui keberhasilan dari suatu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, baru dapat diketahui setelah Narapidana tersebut kembali berada di tengah-tengah masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut sejatinya baru dapat diketahui tingkah laku dari orang tersebut, apakah pembinaan yang ditempuh selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah membawa dampak positif atau sebaliknya. Jika seorang Narapidana pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat dia berbaur, berinteraksi, bersosialisasi dengan wajar, terlebih lagi jika dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, dan dapat menghidupi diri atas kemampuannya sendiri, maka dia merupakan salah satu contoh Warga Binaan Pemasyarakatan yang berhasil dalam pembinaannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dia menjadi manusia baru yang berguna bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.

Untuk membahas permasalahan yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan data-data dari Narapidana yang

ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

TABEL I
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Jombang Per Februari 2017

Kategori	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	
Tahanan	255	6	10	-	271
Narapidana	148	5	2	1	156
Jumlah	427				

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Jombang secara keseluruhan berjumlah 427 orang, yang terbagi menjadi 271 orang tahanan dan 156 narapidana. Dengan jumlah Narapidana yang mencapai 427 orang, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Jombang telah melebihi kapasitas daya tampung lembaga tersebut.

Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas, dengan kondisi Narapidana yang sebagian besar menjalani hukuman pidana di atas satu tahun, jumlah petugas juga harus sesuai dengan jumlah Narapidana yang akan diawasi, di bimbing, dan di binanya. Petugas juga harus berkompeten di bidangnya agar dapat mengawasi para Narapidana secara menyeluruh, sehingga dapat menjamin keberhasilan proses pembinaan yang diberikan guna menciptakan manusia baru yang berguna, bertanggung jawab, dan dapat berbaur dan berinteraksi dengan orang lain, masyarakat dan lingkungannya.

TABEL II
Data Perkara Pidana Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Jombang Per
Februari 2017

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP / UU	Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Terhadap Ketertiban	154-181	22	
2	Mata Uang	224-251	3	
3	Memalsukan Materi / Surat	253-275	3	
4	Kesusilaan	181-297	2	1
5	Perjudian	303	66	3
6	Penculikan	324-336	2	
7	Pembunuhan	338-350	8	
8	Penganiayaan	351-356	1	
9	Pencurian	362-364	57	1
10	Perampokan	365	37	
11	Pemerasan	368-369	4	1
12	Penggelapan	372-375	7	3
13	Penipuan	378	23	2
14	Penadahan	480-481	5	
15	Senjata Tajam	UU Darurat No 12 Tahun 1995	14	
16	Illegal Logging	UU Nomor 18 Tahun 2013, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2004	13	
17	Korupsi	UU Nomor 20 Tahun 2001	13	
18	Perlindungan Anak	UU Nomor 35 Tahun 2014	39	1
19	KDRT	UU Nomor 23 Tahun 2004	3	
20	Laka Lantas	310 KUHP, UU Nomor 22 Tahun 2009	5	
21	Narkoba	UU Nomor 5 Tahun 97, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	89	1
22	Hak Cipta	UU Nomor 22 Tahun 2001, UU Nomor 19 Tahun 2002	4	

23	Lain-Lain	-	2	
Total Per Februari 2017			414	13
			427	

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Melihat dari data jumlah Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, sangatlah penting bagi Lembaga Pemasyarakatan agar petugas lembaga tersebut lebih berkompeten terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaannya, agar warga binaan tersebut dapat memperoleh binaan dengan baik sehingga setelah kembali ke dalam masyarakat tidak mengulangi perbuatannya lagi karena tidak mendapat binaan dengan baik, dan tidak dapat bersaing memperbaiki kehidupannya ataupun tidak memperoleh pekerjaan.

6. Tingkat Pendidikan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang perlu dilaksanakan, mengingat hal tersebut merupakan amanah peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. mengenai tingkat pendidikan narapidana di LAPAS Jombang perlu diketahui sehubungan dengan begitu pentingnya pendidikan, terutama dengan melihat latar belakang pendidikan narapidana di LAPAS Jombang yang sangat beragam. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan narapidana, dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL III
Tingkat Pendidikan Narapidana di LAPAS Jombang Sebelum Menjalani
Hukuman Per Februari 2017

Pendidikan	Tamat	Tidak Tamat
SD	80	40
SLTP	112	67
SLTA	88	25
S1	15	-
Jumlah narapidana	427 orang	

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Dari data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebagian besar narapidana di lembaga Pemasyarakatan Jombang belum tamat sekolah menengah atas, yang mana berarti belum menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun sebagaimana amanah dalam sistem pendidikan nasional. Bagi narapidana yang belum tamat pendidikan sekolah dasar yaitu sejumlah 40 orang, mereka disarankan untuk mengikuti program kegiatan belajar dan membaca tingkat dasar yang diselenggarakan oleh lembaga. Sedangkan bagi narapidana yang belum menyelesaikan pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA disarankan untuk mengikuti program kesetaraan/kejar paket pendidikan di luar lembaga dengan pengawasan pegawai / staff pemasyarakatan, hal tersebut dikarenakan lembaga belum bisa menyelenggarakan program kesetaraan di dalam LAPAS, karena terbatasnya sarana prasarana yang tersedia.

7. Tingkat Pendidikan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan, adapun salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu dari aspek aparatur / petugas pemasyarakatan yang memiliki

latarbelakang pendidikan yang berbeda-beda, disamping itu pula karena kurangnya anggota petugas yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada narapidana. Adapun data mengenai latar belakang pendidikan petugas LAPAS Jombang adalah sebagai berikut :

TABEL IV
Tingkat Pendidikan Petugas Pemasyarakatan di LAPAS Jombang Per Februari 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S-2	4
S-1	10
D-3	18
SLTA	36
SLTP	8
Jumlah	66

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki latarbelakang pendidikan SLTA. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS Jombang dilakukan melalui metode pembimbingan dan pelatihan yang mana dilaksanakan oleh petugas yang berlatarbelakang pendidikan S-1 dan D-3. Adapun petugas pemasyarakatan yang dibebani untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran berjumlah 4 orang petugas, yaitu sebagai berikut :

TABEL V
Tingkat Pendidikan Petugas Pemasyarakatan Yang Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran di LAPAS Jombang

No	Nama Petugas	Kedudukan / Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Affandi, A.Md., S.H., M.H	Kasi Binadik dan Giatja	S-2
2	Samud, S.H	Pembimbing Pendidikan agama	S-1
3	Slamet Sunardi, S.H	Kepala Bidang Pembinaan	S-1
4	Matsunadi, S.I.P	Kasi bimbingan Kerja	S-1

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Bapak Affandi, A.Md., S.H., M.H., selaku Kasi Binadik dan Giatja merupakan penanggungjawab dan pengawas atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kerja terhadap seluruh Narapidana, baik itu pendidikan yang dilaksanakan melalui program pembimbingan maupun pelatihan. Bapak Samud, S.H., selaku Pembimbing Pendidikan agama yang bertanggungjawab atas pelaksanaan hak Pendidikan agama di LAPAS Jombang. Bapak Slamet Sunardi, S.H, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan Jombang, yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan program pembinaan dan pembimbingan bagi Narapidana, yaitu yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pendidikan seni dan budaya yang dilaksanakan melalui kegiatan seni musik hadrah, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pendidikan baca tulis dan berhitung. Sedangkan Bapak Matsunadi, S.I.P, selaku Kasi bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Jombang bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan melalui program pelatihan, yaitu baik pelatihan pertukangan maupun pelatihan jahit menjahit.

Petugas yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kesemuanya tidak ada yang berlatar belakang sarjana pendidikan, oleh karenanya hal tersebut juga merupakan salah satu hambatan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS. Sedangkan untuk guru yang mengajar mengenai keterampilan baca, tulis, dan berhitung terdapat 1 orang guru pengajar yang berlatarbelakang pendidikan Sarjana Pendidikan yang juga merupakan seorang

tutor di salah satu bimbingan belajar yang terdapat di Jombang, guru pengajar tidak didatangkan dari dinas pendidikan. Menurut analisa penulis, seharusnya pihak lembaga pemasyarakatan menambah jumlah anggota petugas pemasyarakatan yang dibebani kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, selain itu penyediaan terkait dengan bahan bacaan agar diperbanyak, baik berupa buku-buku atau majalah-majalah agar hal tersebut dapat membantu menambah pengetahuan narapidana, selain itu lembaga juga adapt mengadakan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat sehubungan untuk merumuskan kurikulum yang digunakan di LAPAS terkait pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dengan begitu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Implementasi Pendidikan dan Pengajaran Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pembimbingan Bagi Peranannya di Masa yang Akan Datang

1. Tahapan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang

Pendidikan dan pengajaran yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Jombang kepada Warga Binaannya bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan masing-masing Warga Binaan dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun bentuk pendidikan yang diberikan oleh LAPAS kepada Warga Binaannya dilaksanakan melalui dua macam kegiatan, yaitu melalui kegiatan pembimbingan dan pelatihan. Melalui kegiatan pembimbingan lembaga melaksanakan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan seni dan budaya, serta pendidikan

bahasa indonesia dan matematika. Sedangkan melalui kegiatan pelatihan, lembaga melaksanakan bentuk kegiatan pendidikan keterampilan, yang terwujud dalam pelatihan jahit menjahit dan pelatihan pertukangan.

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, perlu kiranya bagi Penulis menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada Warga Binaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar Warga Binaan tersebut dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat selepas dia menjalani masa pidananya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa : ⁶⁵

Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jadi, hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H. selaku Kasi Binadik dan Giatja (Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kegiatan Kerja), tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tidak jauh berbeda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor

⁶⁵ Lihat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan adalah sebagai berikut : ⁶⁶

1. Pada tahap pertama pendidikan dan pengajaran diberikan kepada Narapidana dilaksanakan sejak hari pertama Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai sekurang-kurangnya telah menjalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini Narapidana baru tersebut dikenalkan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lingkungannya serta segala peraturan, dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.
2. Tahap kedua dilaksanakan mulai dari 1/3 sampai 1/2 dari masa pidana Narapidana. Pada tahapan ini Narapidana mulai diberikan pendidikan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mandiri.
3. Tahap ketiga diberikan ketika Narapidana menjalani 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini Narapidana mulai diberikan kesempatan untuk berasimilasi.
4. Tahap keempat, dilaksanakan setelah Narapidana menjalani 2/3 masa pidananya sampai dengan berakhirnya masa pidana. Apabila pada tahapan ini Narapidana berkelakuan baik, maka dalam tahap ini dapat diajukan Remisi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat. Semua proses tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan di tentukan lewat proses persidangan.

Tahapan pendidikan pengajaran yang telah sebagaimana disebutkan di atas, terdiri dari empat tahap pembinaan, dimana dalam pelaksanaan tahap pembinaan tersebut didasarkan pada dua unsur yaitu masa pidana dan tingkah laku narapidana.

Pada tahap pertama yang merupakan masa pengenalan lingkungan (admisi orientasi) merupakan tahap awal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. setelah ditetapkan di blok hunian, Warga Binaan akan diberitahukan oleh petugas pemasyarakatan mengenai tata tertib yang ada di LAPAS, nama-nama petugas, kewajiban dan hak warga binaan, dan segala

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H., selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Jombang. *Loc.cit.*

sesuatu yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang. Masa pengenalan lingkungan ini dilakukan selama 7 hari di dalam ruang karantina. Ruang karantina merupakan ruangan khusus yang diperuntukkan bagi Narapidana baru. Dalam masa ini diharapkan agar Warga Binaan dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya sehingga mereka dapat berinteraksi normal di dalam LAPAS. Setelah keluar dari ruang karantina, barulah Warga Binaan tersebut menempati blok hunian atau wisma yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahapan ini mereka mulai dibebani kewajiban untuk mengikuti program pendidikan dan pengajaran, adapun pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada tahapan ini meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan melalui pemberian penyuluhan hukum, pendidikan seni dan budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pendidikan yang diberikan melalui baca tulis dan berhitung tingkat dasar yang diberikan bagi narapidana yang buta huruf dan anak didik pemasyarakatan. Menurut analisa penulis, sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada tahap pertama ini, berkaitan dengan masa admisi orientasi terkait dengan pengenalan terhadap tata tertib dan petugas pemasyarakatan, sebaiknya pihak LAPAS Jombang mensamakan waktu untuk pengenalan tata tertib dan petugas pemasyarakatan yaitu idelanya dalam kurun waktu satu bulan sejak narapidana masuk ke lembaga tersebut, yang kemudian selanjutnya narapidana dibebani kewajiban untuk mengikuti program pembimbingan lainnya.

Pada tahap kedua ini, masing-masing dari Warga Binaan diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan keterampilan yang dilaksanakan pada sebuah

sarana yang memadai yang disebut dengan bengker atau bengkel kerja. Kegiatan ini diselenggarakan dengan pengawasan petugas pemasyarakatan. kewajiban ini harus mereka laksanakan mulai dari Warga Binaan tersebut memasuki masa hukuman 1/3 sampai 1/2 dari masa pembedanaannya.

Pembinaan pada tahap ketiga dilaksanakan dengan memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat. Adapun kesempatan asimilasi yang diberikan oleh lembaga berupa asimilasi internal, berupa kegiatan yang dilakukan dengan mempekerjakan Warga Binaan antara lain untuk membersihkan ruangan, mencabut rumput di kebun LAPAS, menjaga parkir pengunjung LAPAS, menyapu, mengawasi kegiatan kunjungan keluarga warga binaan lain, serta mencuci kendaraan petugas LAPAS.

Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dimana Warga Binaan di nilai sudah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan dan sudah hampir selesai dalam menjalani masa pembedanaannya, dan berhak untuk diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun remisi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya diputuskan untuk benar-benar bebas.

2. Bentuk Implementasi Pendidikan dan Pengajaran Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang

Sebagaimana diatas telah Penulis paparkan bahwasanya yang dimaksud dengan pembimbingan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁶⁷

Meningkatkan kualitas berarti harus ada perbaikan moral dan spiritual bagi Narapidana dan perbaikan itu dilakukan dengan pembinaan sehingga dia nantinya bisa menjadi seorang manusia susila atau manusia seutuhnya. Dengan kata lain, pembimbingan merupakan kegiatan yang diberikan kepada Narapidana yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana menjadi orang yang lebih baik, dengan cara membina pribadi dan budi pekerti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H., selaku Kasi Binadik dan Giatja (Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kegiatan Kerja), saat ditemui di kantornya pada tanggal 6 Februari 2017 : ⁶⁸

Adapun jenis pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana yang dilaksanakan selama ini melalui kegiatan Pembimbingan dan Pelatihan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa : ⁶⁹

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Jombang sebenarnya ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan dari Narapidana itu sendiri. Adapun bentuk implementasi pendidikan dan

⁶⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H. *Loc.cit*

⁶⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

pengajaran bagi Narapidana yang dilaksanakan melalui pembimbingan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Melalui Pendidikan agama diharapkan peserta didik menjadi :

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
2. Berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama dan menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Pelaksanaan pendidikan agama dan budi pekerti diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Adapun standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Agama Islam yang digunakan di sekolah umum, yaitu meliputi aspek-aspek berikut :

1. Peserta didik mampu membaca Al-Quran dan menulisnya dengan benar serta berusaha memahaminya.
2. Peserta didik membiasakan diri untuk berkepribadian muslim (berakhlak mulia).

3. Peserta didik mampu memahami sejarah Islam dan perkembangan agama Islam.
4. Peserta didik mampu menerapkan aturan-aturan dasar Islam dalam kehidupan keseharian.

Sedangkan mengenai standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Agama Kristen yang digunakan di sekolah umum, yaitu meliputi aspek-aspek berikut :

1. Peserta didik mempelajari visi kekristenan dalam kehidupan, dengan melayani satu sama lain, berbagi kebahagiaan, dan menanggung beban.
2. Peserta didik mencintai Tuhan dan melayaniNya dengan jiwa sebagai murid kristus.
3. Pendidik diharuskan membimbing murid-muridnya untuk mengkomunikasikan dan membangun teori-teori yang sesuai dengan nilai Alkitabiah.

Pendidikan agama diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan supaya para Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kesalahan-kesalahan serta agar semakin mempertebal keimanan mereka. Pendidikan ini juga dianggap sebagai kegiatan pendidikan paling awal yang harus diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang. Pendidikan di bidang ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama masing-masing Warga Binaan serta melalui kegiatan ini pula mereka diharapkan mampu menyadari atau menginsyafi perbuatan yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama masing-masing. Dalam

Lembaga Pemasyarakatan Jombang pendidikan agama ini biasa disebut dengan pendidikan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samud, S.H., selaku Pembimbing Pendidikan Keagamaan, mengatakan bahwa : ⁷⁰

Pendidikan agama diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memantapkan mereka dalam menguasai pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, 80 % rata-rata beragama Islam, 20 % lainnya beragama Nasrani. Sehingga pengajaran pendidikan agama dilaksanakan di dalam musholla bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeluk agama Islam, dan di gereja LAPAS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeluk agama Nasrani.

Terkait Materi pembelajaran pendidikan agama yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang yang dilaksanakan setiap hari yaitu meliputi, kegiatan shalat dhuha berjamaah yang dilanjutkan dengan mengaji yang wajib dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, Siraman Rohani oleh ulama dari luar LAPAS yang kemudian dilanjutkan dengan shalat dhuhur berjamaah, dan shalat ashar berjamaah. Sedangkan untuk kegiatan shalat ashar berjamaah yang dilanjutkan dengan pembacaan shalawatan dan pembacaan surat yasin dilaksanakan pada hari senin dan kamis.

Pada hari sabtu pukul 16.00 – 17.00 setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti acara ceramah agama / pengajian dengan Pemateri K.H. Nur Hadi, Spd.I atau yang lebih dikenal dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Samud S.H., selaku Pembimbing Pendidikan Keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Jombang. 4 Februari 2017.

ustadz “Mbah Bolong”, beliau ini merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Falahul Muhibbin. Adapun materi pendidikan agama melalui siraman rohani / ceramah agama yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan februari 2017 yaitu :

TABEL VI
Materi Pendidikan Agama Melalui Siraman Rohani Per Februari 2017

No	Hari, Tanggal	Materi	Penceramah
1	4 Februari 2017	Materi tentang shalat (7 macam shalat sunnah yang diperintahkan Nabi Muhammad)	K.H. Nur Hadi, Spd.I
2	11 Februari 2017	Materi tentang ilmu (Islam merupakan agama, ilmu, dan kebijaksanaan)	K.H. Nur Hadi, Spd.I
3	18 Februari 2017	Materi tentang akhlak (Menumbuhkan sikap qanaah dalam kehidupan)	K.H. Nur Hadi, Spd.I
4	25 Februari 2017	Materi tentang kematian (Fitnah kubur, pertanyaan malaikat, dan alam barzakh)	K.H. Nur Hadi, Spd.I

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Pelaksanaan pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tidak hanya diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam semata, Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Nasrani pun memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemberian pendidikan dan pengajaran di bidang agama, hal ini terwujud dalam diselenggarakannya kegiatan kebaktian di gereja LAPAS yang wajib diikuti oleh semua WBP yang beragama Nasrani, kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin, kamis, jumat, dan minggu pada pukul 10.00 – 12.00 wib, kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangkan pendeta yang berasal dari gereja setempat.

Kegiatan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan sangat bermanfaat bagi perkembangan jiwa dan kehidupan sosial para Narapidana itu

sendiri, karena selain dengan mengikuti kegiatan yang diberikan oleh lembaga, mereka dapat berinteraksi dengan orang lain, serta dengan mengikuti kegiatan pendidikan agama ini para Narapidana mendapatkan bimbingan rohani, menguasai pengetahuan tentang ajaran agama, dan juga dapat mempertebal rasa keimanan yang ada pada diri mereka. Dalam menjalankan pendidikan di bidang keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan Jombang menyediakan sarana dan prasarana peribadahan seperti :

a. Musholla Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Musholla / Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat muslim. Musholla LAPAS Jombang ini biasa digunakan bagi Warga Binaan yang memeluk agama Islam. Rutinitas yang mereka lakukan di Musholla LAPAS ini adalah shalat wajib lima waktu, shalat sunnah dhuha, shalat jumat, termasuk juga shalat pada hari-hari besar keagamaan seperti shalat ied pada hari raya idul fitri dan idul adha, dan membaca ayat suci Al-Quran. Selain itu di Musholla ini juga dilaksanakan pembinaan pendidikan agama melalui ceramah agama / pemberian pengajian, mereka juga dibebani kewajiban agar selalu turut serta dalam menjaga kebersihan Musholla.

b. Gereja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang

Gereja Lembaga Pemasyarakatan Jombang hanya dipergunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Nasrani pada saat adanya kegiatan kebaktian yang dilaksanakan pada hari senin, kamis, dan jumat. Kegiatan kebaktian ini dilakukan dengan mendatangkan

pendeta dari gereja setempat. Selain itu, perayaan kebaktian di gereja LAPAS juga dilakukan pada hari raya Natal, hal ini dilakukan sebagai bentuk dan wujud penemunah hak keagamaan bagi mereka, semata-mata agar mereka dapat menunaikan ibadahnya sekalipun sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bapak Samud, S.H., merupakan salah satu staf pelayanan tahanan yang bertindak khusus selaku Pembimbing Pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tersebut. Adapun mengenai roster kegiatan pendidikan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Jombang ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL VII
Jadwal Kegiatan Pendidikan Agama Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang Per Februari 2017

Hari	Jenis Kegiatan	Jam
Senin	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00
	Kebaktian di gereja Lapas untuk WBP Nasrani.	10.00 - 12.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashar berjamaah dilanjutkan shalawatan dan pembacaan surat yasin.	14.45 - 15.30
Selasa	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashar berjamaah.	14.45 – 15.30
Rabu	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashar berjamaah.	14.45 – 15.30
Kamis	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00

	Kebaktian di gereja Lapas untuk WBP Nasrani.	10.00 - 12.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashhar berjamaah dilanjutkan shalawatan dan pembacaan surat yasin.	14.45 - 15.30
Jumat	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00
	Kebaktian di gereja Lapas untuk WBP Nasrani.	10.00 - 12.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashhar berjamaah.	14.15 – 15.30
Sabtu	Shalat dhuha berjamaah di masjid dilanjutkan mengaji.	08.00 - 09.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashhar berjamaah.	14.15 – 15.30
	Siraman rohani oleh ustadz “Mbah Bolong”.	16.00 – 17.00
Minggu	Shalat dhuha di kamar masing-masing WBP.	08.00 - 09.00
	Kebaktian di gereja Lapas untuk WBP Nasrani.	10.00 - 12.00
	Siraman Rohani oleh ulama dari luar lapas dilanjutkan shalat dhuhur berjamaah.	11.30 - 13.20
	Shalat ashhar berjamaah.	14.15 – 15.30

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Dari tabel di atas, Penulis menyajikan jadwal kegiatan pendidikan agama yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Jombang sebagai pengisi hari-hari Narapidana dan sekaligus sebagai proses pembimbingan.

Melihat dari tabel diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya implementasi pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Jombang dilaksanakan dengan cukup baik, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa kegiatan pendidikan agama di lembaga tersebut cukup padat dan dilaksanakan secara terus menerus. Namun, pelaksanaan pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, belum dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum pendidikan agama

sebagaimana yang diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan umum (sekolah), pelaksanaan pendidikan agama dan budi pekerti di LAPAS Jombang hanya dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan shalat wajib berjamaah, shalat dhuha berjamaah, mengaji, dan pemberian kegiatan siraman rohani, yang diperuntukkan bagi WBP yang beragama Islam. Sedangkan bagi WBP Nasrani melalui kegiatan kebaktian di gereja LP. Selain itu pula, bagi Warga Binaan yang beragama Islam Lembaga Pemasyarakatan hanya melaksanakan pendidikan agama melalui kegiatan shalat wajib, shalat sunnah dhuha, membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca shalawat, dan ceramah agama, Lembaga belum mengadakan pendidikan agama tingkat dasar, yaitu berupa pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran tingkat dasar (pembelajaran mengenal dan menulis huruf-huruf Al-Quran) dan pembelajaran membaca Al-Quran tingkat lanjutan (Ilmu Tajwid), sehingga pendidikan agama terkait mengaji / membaca Al-Quran hanya dilakukan bagi mereka yang mampu melakukan saja, bagi Warga Binaan yang belum bisa membaca Al-Quran tidak dikenai jadwal giliran mengaji di Musholla LAPAS. Selain itu, semua pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Jombang dilaksanakan di bawah pengawasan Bapak Samud, S.H., kecuali terkait dengan kegiatan ceramah agama dilakukan dengan mendatangkan pemateri dari luar lembaga. Hal yang terakhir adalah, pendidikan agama yang dilaksanakan di LAPAS tidak memiliki kurikulum yang ajeg / tetap, pelaksanaannya hanya didasarkan pada jadwal kegiatan yang telah dirumuskan oleh pembina pemasyarakatan sebelumnya.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek berikut : ⁷¹

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi : Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Sistem hukum dan peradilan internasional.

⁷¹ GoogleDocs. *Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. [Http://docsgoogle.com](http://docsgoogle.com). Diakses 30 Maret 2017

3. Hak asasi manusia meliputi : Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi : Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi : Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi : Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi : Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi : Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak Globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Sehubungan dengan standarkurikulum dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, pihak LAPAS melaksanakan pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan penyuluhan hukum agar Narapidana mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta dalam hal penegakan hukum.

Penyuluhan hukum tersebut diberikan agar dapat meningkatkan kualitas kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian penyuluhan hukum juga dimasukkan agar Warga Binaan Pemasyarakatan mengetahui norma, hukum, dan segala peraturan-peraturan yang dilarang, diperbolehkan, maupun dianjurkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu Narapidana tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki kesadaran hukum semata tetapi juga dituntut agar taat dan

patuh kepada hukum serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Penyuluhan hukum tersebut diberikan atas anggapan bahwa sejak Warga Binaan melakukan suatu tindak pidana, sejak itu pula mereka dianggap tidak sadar hukum atas peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan mereka mampu menyadari akan hukum yang berlaku setidaknya mereka mentati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Jombang ialah kewajiban seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku tersebut, merujuk pula bahwa Warga Binaan juga diharuskan untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

Berkaitan dengan kewajiban Warga Binaan untuk mentaati dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Taat dalam melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta memelihara kerukunan beragama di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada seluruh Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.

- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Adapun bagi Warga Binaan yang tidak mematuhi peraturan tata tertib tersebut maka akan dijatuhi sanksi, adapun sanksi yang diberikan bagi Warga Binaan yang melanggar peraturan tata tertib tersebut yaitu : ⁷²

- a. Diasingkan selama 7 (tujuh) hari di sel tersendiri dalam keadaan seorang diri.
- b. Tidak diberikan izin untuk mendapat kunjungan keluarga.
- c. Dimasukkan ke dalam daftar Register F (daftar orang yang dikenai sanksi tindakan disiplin dan tidak akan menerima remisi, CB, atau PB).
- d. Dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di LAPAS Jombang dilakukan dengan metode pemberian pemahaman mengenai tata tertib yang berlaku di LAPAS dan melalui penyuluhan hukum yang wajib diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet Sunardi : ⁷³

Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan setiap empat bulan sekali dengan pemateri kegiatan yang berasal dari 3 institusi lembaga yang terjadwal secara bergilir, pertama dari Polres yang dilaksanakan oleh pihak Binmas, kedua dari PNS yang dilaksanakan oleh Hakim Wasmat, dan ketiga dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Tahanan.

⁷² Wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H. *Loc.cit*

⁷³ Wawancara dengan Bapak Slamet Sunardi, S.H., selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Jombang. 6 Februari 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari 1 tahun, mereka hanya pernah dua kali mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tidak memenuhi pedoman, standar kurikulum, serta aspek-aspek yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan yang telah ditentukan dalam lingkup pendidikan umum di sekolah. Lembaga hanya melaksanakan pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan penyuluhan hukum, kegiatan penyuluhan hukum merupakan satu dari sekian banyak aspek dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi singkatnya, lembaga belum melaksanakan pendidikan kewarganegaraan secara utuh sebagaimana pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada umumnya.

4. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Kesehatan jasmani merupakan pilar yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila.

⁷⁴ Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Jombang. 7 Februari 2017.

Adapun standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Jasmani dan Kesehatan meliputi aspek-aspek berikut :

1. Berfokus pada badan, aktivitas jasmani, dan perkembangan fisik.
2. Berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan jasmani dan kesehatan.
3. Memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi ruang dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik yang berguna bagi pembentukan gaya hidup sehat.
4. Siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pendidikan jasmani.
5. Peranan dari pendidikan jasmani yaitu berupa belajar gerak dan belajar sambil bergerak yang tercermin dalam aktivitas pembelajaran.
6. Pengajar diharapkan mengembangkan aspek afektif, yaitu melibatkan aktivitas siswa yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan membangkitkan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani dan kesehatan.
7. Bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan profesional di kemudian hari dalam bidang olahraga dan aktivitas jasmani.

Pendidikan kesehatan jasmani dan kesehatan diberikan sehubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, agar nantinya mereka dapat mengikuti setiap kegiatan pembinaan dengan baik.

Pendidikan kesehatan jasmani merupakan amanah sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : ⁷⁵

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
- a. Pemberian kesempatan olahraga dan rekreasi.
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Pendidikan kesehatan jasmani diperuntukkan bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan bugar walau sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pendidikan jasmani jugadilaksanakan agar para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak merasa tertekan dalam Lembaga, dan juga agar mereka dapat berinteraksi dan bekerja dengan sesama Narapidana. Hal demikian juga berguna untuk memudahkan mereka dalam belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat nantinya selepas mereka menjalani masa pembedaanannya nanti. Untuk kegiatan jasmani dan rohani para Narapidana dilakukan dengan kegiatan berolahraga, kegiatan olahraga antara lain yang sudah ada dan disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

1. Senam pagi setiap hari.
2. Bola Voli.
3. Tenis Meja, dan
4. Catur.

⁷⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Jombang Slamet Sunardi, S.H. : ⁷⁶

“Kegiatan senam pagi dilaksanakan setiap hari di lapangan Lembaga yang dipimpin oleh instruktur senam yang berasal dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan, khusus untuk hari jumat senam pagi dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan bersamaan dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk sarana olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Jombang disediakan lapangan voli, peralatan tenis meja, dan papan catur. Untuk tenis meja dan papan catur biasanya dipergunakan Narapidana dilaksanakan di waktu senggang mereka, sedangkan untuk voli biasanya pada waktu sore hari”.

Karena olahraga tidak dimasukkan ke dalam jadwal pembinaan secara khusus jadi Narapidana dapat melakukannya kapanpun di waktu senggang mereka. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang pelaksanaan pendidikan jasmani dan kesehatan hanya diberikan melalui penyediaan fasilitas/sarana olahraga yang ditujukan bagi anak didik pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Pola pendidikan kesehatan jasmani hanya dilaksanakan di waktu senggang mereka, kecuali terkait dengan pelaksanaan kegiatan senam pagi dilaksanakan terjadwal setiap hari. Oleh karenanya dapat penulis simpulkan bahwa terkait pelaksanaan pendidikan jasmani dan kesehatan di lembaga pemasyarakatan sangat jauh berbeda dengan di sekolah-sekolah umum. Pelaksanaan pendidikan jasmani dan kesehatan di LAPAS tidak memnunhi aturan baku dan standar sebagaimana kegiatan pendidikan jasmani dan kesehatan yang dilakukan di sekolah umum.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet Sunardi, S.H. *Loc.cit*

4. Pendidikan Seni dan Budaya

Pendidikan seni dan budaya merupakan cara atau strategi menanamkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengkondisikan peserta didik menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya dan karakteristiknya secara khas.

Adapun beberapa aspek standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Seni dan Budaya, diantaranya yaitu :

1. Peserta didik memahami konsep dan pentingnya seni dan budaya.
2. Peserta didik dapat menampilkan sikap apresiasi terhadap seni dan budaya.
3. Peserta didik dapat menampilkan kreativitas melalui seni dan budaya.
4. Peserta didik dapat menampilkan peran serta dan bakatnya baik dalam aspek seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater.

Pelaksanaan pendidikan seni dan budaya yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Jombang adalah pembelajaran seni musik hadrah. Kesenian hadrah merupakan kesenian musik islam dimana dalam permainannya menggunakan beberapa alat musik yang ditabuh, seperti rebana, teplak, jimbe, dan lainnya.

Pendidikan kesenian musik ini diberikan pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu yang dilakukan pada pukul 16.00 – 17.00 wib. Dalam pelaksanaannya mendatangkan pelatih yang tugasnya adalah memberikan penjelasan mengenai alat, cara memegang alat, memainkan alat, serta melatih pelafalan dalam vokal.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan seni dan budaya di lembaga pemasyarakatan jombang diberikan dengan cara pembelajaran kesenian musik, yaitu seni musik hadrah. Lembaga belum dapat melaksanakan pendidikan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan di sekolah-sekolah umum, dikarenakan terbatasnya tenaga pendidik di lapas, tenaga pendidik di lapas merupakan pegawai/petugas lapas yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang mengajar dan dalam bidang ilmu pendidikan. Selain itu lembaga juga tidak memiliki kurikulum tersendiri sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan seni dan budaya. Sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama antara warga binaan dan petugas lapas.

5. Pendidikan Bahasa Indonesia dan Matematika

Adapun standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan Bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan formal, antara lain yaitu : ⁷⁷

1. Peserta didik dapat menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara.
2. Peserta didik dapat memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakan dengan tepat untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan.
3. Peserta didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis).
4. Peserta didik mampu menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial.
5. Pembelajaran didasarkan pada aspek mendengarkan, seperti mendengarkan berita, pesan, ceramah, khotbah, pidato, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, dan pantun.
6. Pembelajaran didasarkan pada aspek membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, berbagai teks bacaan, kamus, ensiklopedia, dan juga kompetensi membacadiarahkan guna menumbuhkembangkan budaya membaca.

⁷⁷ FKIP Unri. *Filosofi Pendidikan Bahasa Indonesia*. <http://fkip.unri.ac.id>. Diakses tanggal 30 Maret 2017.

7. Pembelajaran didasarkan pada aspek menulis, seperti menulis huruf, karangan singkat, dengan pemakaian tanda baca, dan kosakata yang tepat.

Adapun standar kurikulum dan ruang lingkup Pendidikan matematika dalam lembaga pendidikan formal, antara lain yaitu :⁷⁸

1. Peserta didik mampu menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, atau grafik untuk memperjelas keadaan atau masalah.
2. Peserta didik mampu menggunakan penalaran pola, sifat, atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
3. Peserta didik mampu menunjukkan kemampuan strategik dalam merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah.
4. Peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Jombang Slamet Sunardi, S.H. : ⁷⁹

Pendidikan yang diberikan kepada anak berupa pendidikan membaca, menulis, dan berhitung sebagaimana yang bisa didapatkan dalam pendidikan formal dalam bangku sekolah.

Selain itu, bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang tidak lulus sekolah dan berminat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan (kejar paket pendidikan) juga akan diberikan izin untuk mengikuti ujian di salah satu sekolah dengan pengawalan pegawai/staff Lembaga Pemasarakatan. Pendidikan kesetaraan ini merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam kegiatannya. Program kesetaraan merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan luar sekolah sebagai suatu sub sistem pendidikan non formal. Program pendidikan kesetaraan

⁷⁸ FKIP Unri. *Standar Kompetensi Matematika*.<http://fkip.unri.ac.id>. Diakses tanggal 30 Maret 2017.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet Sunardi, S.H. *Loc.cit*

biasanya diselenggarakan melalui Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis yang lainnya.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 ayat (12) ditegaskan bahwasanya : ⁸⁰

Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Jadi yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur dan sadar tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Selain itu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa : ⁸¹

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan majelis talim, serta satuan pendidikan lainnya yang sejenis.

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) program Paket A yang setingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B yang setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), ataupun Paket C yang setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Mengenai pelaksanaan program kesetaraan itu sendiri, pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa menyelenggarakan program kesetaraan di dalam LAPAS, faktor pertama yaitu karena tidak tersedianya sarana dan prasarana (ruangan) yang memadai untuk menyelenggarakan program kesetaraan tersebut.

⁸⁰ Lihat Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸¹Lihat Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Aula serbaguna yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terkadang saja sudah tidak dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan insidental yang dilaksanakan oleh pihak LAPAS, apalagi apabila ruangan aula itu digunakan untuk menyelenggarakan program kesetaraan maka akan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang terbengkalai karena dialihfungsikannya ruangan aula itu untuk program kesetaraan, oleh karenanya sangat tidak dimungkinkan program tersebut dilakukan di dalam LAPAS. Faktor kedua, karena jumlah Narapidana anak di LAPAS yang tidak terlalu banyak, yaitu ketika penulis melakukan penelitian pada bulan Februari 2017 jumlah Narapidana anak yaitu sebanyak 6 orang dan Tahanan anak berjumlah 6 orang, oleh karena jumlah mereka yang tidak terlampau banyak, maka sangat tidak dimungkinkan apabila pihak Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di dalam LAPAS, jadi apabila mereka berminat untuk mengikuti program kesetaraan akan diberikan izin untuk mengikuti ujian di salah satu sekolah dengan pengawasan pegawai / staff Lembaga Pemasyarakatan atau bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang potensial dan menjalani masa hukuman di atas 1 tahun maka akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan anak di Blitar.

Kendati pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan pendidikan kesetaraan di dalam Lembaga, tetapi Anak Didik Pemasyarakatan dan Warga Binaan yang buta huruf diberikan pendidikan intelektual berupa “Membaca, Menulis, dan Berhitung (CALISTUNG)” yang dilaksanakan selama 1 kali dalam sepekan, kegiatan ini dilakukan dengan mendatangkan seorang tutor

yang merupakan seorang Sarjana Pendidikan dari salah satu Pusat Bimbingan Belajar setempat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Aula LAPAS.

Jumlah Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang per Februari 2017 adalah sebanyak 6 (enam) orang, mereka memiliki riwayat dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Apabila kita merujuk pada ketentuan yuridis, bahwa pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : ⁸²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ⁸³

Adapun mengenai data Narapidana anak berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL VIII
Pendidikan Terakhir Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B jombang Per Februari 2017

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Yogi Pradana	17	Tidak Tamat SMP
2	Rahmat Ulumuddin	16	Tidak Tamat SMA
3	Iwan Kurniawan	15	Tidak Tamat SMP

⁸² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4	Syamsul Arifin	16	Tidak Tamat SMP
5	Mustakim	16	Tidak Tamat SMP
6	Dewi Mashithah	17	Tidak Tamat SMP

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Februari 2017.

Selain itu, untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan intelektual semua Warga Binaan Pemasyarakatan Jombang, diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar, yaitu dengan membaca koran/majalah dan buku-buku yang tersedia di Aula LAPAS.

Adapun mengenai pelaksanaan pendidikan bahasa indonesia dan matematika di Lembaga Pemasyarakatan Jombang ini belum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sempurna, karena dalam pelaksanaannya Anak Didik Pemasyarakatan hanya diberikan pendidikan intelektual berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tingkat dasar saja. Pihak Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki panduan kurikulum belajar tersendiri di LAPAS terkait dengan pelaksanaan pendidikan intelektual yang wajib diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.

Bahwa perlu kiranya bagi Penulis untuk menekankan sekali lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat (1) dalam huruf c menegaskan bahwa :

Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut berlaku untuk semua jenis pendidikan dan pengajaran, tak terkecuali dalam hal pemberian baca tulis dan berhitung. Oleh karena ini hak maka harus diberikan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh dibedakan dengan mereka yang mendapatkan

pendidikan tersebut di luar LAPAS. Namun, peraturan hanya akan menjadi sebuah tulisan semata apabila Pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan belum dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tersebut secara sempurna. Terlebih terkait dengan pendidikan kesetaraan, pihak Lembaga Pemasyarakatan pun belum dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan tersebut di dalam lembaga, alhasil bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ingin mengikuti program pendidikan kesetaraan harus mengikuti program tersebut di luar lembaga dengan pengawasan petugas / staff pemasyarakatan.

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan di lembaga pemasyarakatan, jika dikaitkan dengan standar sarana dan prasarana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁸⁴

Selain itu, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional juga mewajibkan bahwasanya setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :

- a. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus.

⁸⁴ Lihat Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

- b. kalender pendidikan/akademik, yang menunjukan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
- c. struktur organisasi satuan pendidikan.
- d. pembagian tugas di antara pendidik.
- e. pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
- f. peraturan akademik.
- g. tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana biaya operasional satuan pendidikan.⁸⁵

Berdasarkan isi Pasal 42 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, menurut analisa penulis, pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di dalam lembaga masyarakat tidak memenuhi kualifikasi dan standar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemberian hak pendidikan dan pengajaran di lembaga masyarakat jombang, belum diberikan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, singkatnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga masyarakat jombang melanggar ketentuan dalam pasal Pasal 42 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

C. Implementasi Pendidikan dan Pengajaran Bagi Warga Binaan Masyarakat Melalui Pelatihan Bagi Peranannya di Masa yang Akan Datang

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk pendidikan dan pengajaran bagi Warga Binaan Masyarakat yang diselenggarakan melalui

⁸⁵ Lihat Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

pelatihan, perlu kiranya bagi Penulis untuk menegaskan sekali lagi bahwasanya hal ini tidak terlepas dari amanah sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa :⁸⁶

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Suatu pelatihan yang dilaksanakan, pada hakikatnya berorientasi atau memberikan penekanan pada tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang, selain itu pelatihan juga menekankan kepada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai istilah “*Pelatihan*” adalah :⁸⁷

- a. Proses, cara, atau perbuatan melatih baik itu kegiatan atau pekerjaan.
- b. Proses belajar untuk membiasakan diri agar dapat (mampu) melakukan sesuatu.
- c. Proses seseorang untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan agar terbiasa dan mampu membiasakan diri untuk melakukan sesuatu.

Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya berpendapat bahwa “Pelatihan merupakan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan seseorang yang menduduki suatu tugas atau pekerjaan tertentu”.⁸⁸

⁸⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁸⁷ Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 971.

⁸⁸ Soekidjo Notoadmojo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 26.

Wexley dan Yulk dalam buku Mangkunegara, mengatakan bahwa “Pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana, yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan kemampuan (*skill*), pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau suatu anggota organisasi tertentu”.⁸⁹

Menurut hemat penulis, dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Pelatihan lebih ditujukan kepada seseorang yang menduduki tugas dalam suatu organisasi tertentu guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Adapun menurut Mangkunegara, tujuan dilaksanakannya pelatihan yaitu diantaranya adalah :⁹⁰

- a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Meningkatkan kualitas kerja.
- d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja.
- f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal.
- g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.
- h. Menghindarkan keusangan (*obsolescence*).
- i. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai.

⁸⁹ Anwar Prabu Mangkunegara. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Refika Aditama. Hal. 49.

⁹⁰*Ibid.* Hal. 52

Agar Warga Binaan Pemasyarakatan sesudah menjalani masa pemidanaannya kelak siap untuk diterjunkan ke masyarakat, mereka perlu diberikan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan melalui program pelatihan-pelatihan. Program pelatihan ini berupa bimbingan kerja dan pelatihan sesuai dengan keahlian-keahlian yang mereka minati. Bimbingan kerja dan pelatihan lain sesuai dengan keahlian yang diminati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ini diselenggarakan agar mereka mau dan mampu mewujudkan kehendak / keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan / perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang / jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka nantinya dan sesamanya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar dikemudian hari mereka dapat menggunakan keahliannya tersebut ketika mereka bebas nantinya sehingga mampu bertindak sesuai dengan keadaan tanpa perlu meminta atau bergantung pada orang lain. Program pendidikan dan pengajaran melalui bimbingan kerja dan pelatihan sesuai dengan keahlian yang mereka minati ini menjadi suatu kewajiban bagi Narapidana untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan tersebut. Adapun program Program pendidikan dan pengajaran melalui bimbingan kerja dan pelatihan yang diminati oleh Narapidana, antara lain meliputi :

1. Pelatihan Jahit Menjahit

Pendidikan keterampilan jahit menjahit diperuntukkan bagi Narapidana wanita, yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jadwal yang telah disesuaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Narapidana Wanita, diakui oleh mereka bahwa pendidikan keterampilan jahit

menjahit ini sangat berguna untuk mengisi waktu luang mereka dan membantu menghilangkan rasa jenuh.⁹¹ Hampir dari seluruh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Jombang ini memiliki bakat menjahit sehingga rasa senang dan antusiasme mereka cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun produk jahit menjahit yang dibuat berupa gorden, keset, seprai, kain pelapis mebel, dan taplak, semua produk tersebut dibuat dari kain perca.

Hasil dari keterampilan jahit menjahit dari Narapidana Wanita ini biasanya dipamerkan dan diperjualbelikan dalam acara tujuh belas agustus, ulang tahun Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), serta ulang tahun Lembaga Pemasyarakatan. selain itu, gorden-gorden yang terpasang di Ruang LAPAS Jombang merupakan hasil karya dari para Narapidana Wanita, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan jahit menjahit ini banyak membuahkan manfaat dan hasil, baik untuk Narapidana Wanita itu sendiri yaitu untuk mengisi waktu luang mereka selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta bagi pihak LAPAS pendidikan keterampilan jahit menjahit ini dapat dijadikan suatu indikator atas berhasilnya program pembinaan yang mereka laksanakan.

2. Pelatihan Pertukangan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka

⁹¹ Wawancara dengan Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

dinyatakan bebas dan keluar Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pendidikan keterampilan pertukangan ditujukan bagi Narapidana laki-laki yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu, yakni pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, dan sabtu pada pukul 07.00 – 13.30 wib.

Untuk menunjang keterampilan pertukangan, LAPAS ini telah menyediakan ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan meliputi pembuatan ranjang, sangkar burung, kursi, meja, lemari, dan asbak yang terbuat dari koran-koran bekas. Para Narapidana yang telah mengikuti kegiatan ini mengaku sangat senang, selain mereka dapat mengisi waktu luang dan menyalurkan bakatnya, mereka juga mendapatkan premi dari hasil penjualan karya mereka. Namun, jumlah Narapidana yang rutin mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah Narapidana laki-laki, hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak tertarik untuk mengikuti pendidikan ini dan tidak memiliki *skill* di bidang pertukangan. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk membaca Al-Quran di Musholla LAPAS, dibanding mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan pertukangan ini.

Semua pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang dibantu oleh petugas pengamanan dan yang bertindak sebagai pembimbing bidang keterampilan dan kegiatan kerja adalah Bapak Affandi, AMd., I.P., S.H., M.H. Adapun bentuk pendidikan dan pengajaran yang berjalan saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Jombang dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IX
Bentuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Jombang

No	Bentuk Pendidikan	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Pemateri / Tutor	Peserta Kegiatan
1.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran melalui Pembinaan.	Pendidikan Keagamaan	Ada pada Tabel III	Ada pada Tabel III	(Siraman Rohani Bagi WBP Islam dengan K.H. Nur Hadi, S.Pd.I.) dan (Kebaktian di Gereja Lapas bagi WBP Nasrani dengan Pemuka Gereja Jombang Setempat)	Semua WBP (baik yang beragama Islam dan Nasrani)
		Pendidikan Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	4 bulan sekali	Pihak Polres melalui Binmas, PNS melalui Hakim Wasmat, dan LP melalui Seksi Pelayanan Tahanan	Semua WBP
		Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani	Senam Pagi, Bola Voli, Tenis Meja, dan Catur	Senam pagi setiap pagi. Bola Voli, Tenis Meja dan Catur (Waktu Menyesuaikan)	Instruktur Senam (Ibu Mahmudah)	Semua WBP
		Pendidikan Kesenian	Seni Musik Hadrah	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu	Bapak Samud, S.H.	Semua WBP

				(Pukul 16.00 – 17.00)		
		Pendidikan Kemampuan Intelektual	Baca, Tulis, dan Berhitung serta Pendidikan Kesetaraan	Selasa, Kamis, dan Jumat (Pukul 14.00 – 16.00)	Prima Faqih, S.pd.	WBP buta aksara dan Anak Didik Pemasarakatan
2.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran melalui Pelatihan.	Pendidikan Keterampilan Jahit Menjahit	Keterampilan Jahit Menjahit	Selasa, Kamis, dan Sabtu	Bapak Matsunadi	Semua WBP Wanita
		Pendidikan Pertukangan Pengelasan	Pertukangan	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu (07.00 – 13.30 wib)	Bapak Matsunadi	Semua WBP Laki-Laki

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasarakatan Jombang, Februari 2017.

Di Lembaga Pemasarakatan, pendidikan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan, maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, tak terkecuali warga negara yang sedang menjalani masa pembedanaannya di Lembaga Pemasarakatan. pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Melalui pendidikan pula kemampuan solidaritas dan kepekaan dilatih. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting.

Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada saat mereka telah selesai menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pendidikan dan pengajaran lainnya yang dikhususkan bagi pemulihan sikap dan mental, dilakukan secara individual. Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan karena dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai macam sifat dari Narapidana yang berbeda antara satu dan lainnya, yang tentunya juga membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda pula.

Pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sendiri, dan dari instansi di luar Lembaga Pemasyarakatan demi terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bapak Slamet Sunardi, S.H. :

Bahwa dalam hal memberikan pendidikan bahasa Indonesia dan matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan berupa senam pagi, pendidikan agama berupa siraman rohani, serta pelatihan keterampilan, diadakan kerja sama dengan pihak luar dari Lembaga Pemasyarakatan, baik itu kerja sama dengan individu selaku pemateri kegiatan ataupun kerja sama dengan Dinas terkait. Sehingga dalam keterampilan kerja dan hidup, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat lebih diarahkan kepada kebutuhan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah Jombang itu sendiri.⁹²

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Melalui pendidikan pula, orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarginalkan secara ekonomi dan sosial

⁹² Wawancara dengan Bapak Slamet Sunardi, S.H. *Loc.cit*

dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam suatu komunitas yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan kesalahan Narapidana semata, melainkan juga memperhatikan masa depan setelah mereka keluar dari LAPAS. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada Narapidana meliputi bidang yang bersifat pembinaan dan pelatihan. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran diharapkan dapat dijadikan sebagai bekal hidup Narapidana selepas ia menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui pemberian pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, atau setidaknya mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

D. Faktor yang Menghambat Pemenuhan Pendidikan dan Pengajaran Melalui Pembinaan dan Pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Jombang

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (Narapidana) hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses pemasyarakatan itu sendiri.⁹³ Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lembaga Pemasyaraatan menjadi faktor yang teramat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan terhadap

⁹³ A. Jolias Simon R dan Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. Hal. 30.

Narapidana. Secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (*Over Capacity*).

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan dan pemasyarakatan, selain tidak seimbang kapasitas / daya tampung Lembaga terhadap jumlah Warga Binaan, juga keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. “Permasalahan di tubuh Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru dan terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan”.⁹⁴

Lembaga pemasyarakatan Klas II B Jombang yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Jombang.

Pada dasarnya pemberian pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja ditemukan beberapa kendala dan ketimpangan-

⁹⁴*Ibid*

ketimpangan selama dilaksanakannya proses pembinaan di dalam LAPAS tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H. selaku Kasi Binadik dan Giatja (Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kegiatan Kerja) Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, diantaranya adalah :⁹⁵

1. Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perlengkapan ibadah, perlengkapan olahraga, perlengkapan kesenian, perlengkapan pendidikan, serta perlengkapan di bengkel kerja. Terkait dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lembaga Pemasyarakatan Jombang dinilai sudah cukup baik, akan tetapi masih belum maksimal untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran yang diinginkan. Salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran yang belum terlaksana dengan cukup baik di Lembaga Pemasyarakatan jombang terkait dengan program kesetaraan, bahwasanya bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ingin mengikuti program pendidikan kesetaraan maka akan diberikan izin untuk mengikuti ujian di salah satu sekolah dengan pengawasan pegawai / staff Lembaga

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Affandi, A.Md., I.P., S.H., M.H. *Loc.cit*

Pemasyarakatan atau bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang potensial maka akan dipindahkan ke LP Anak di Blitar, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, sebab Lembaga Pemasyarakatan Jombang belum bisa untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sendiri di dalam Lembaga, dikarenakan tidak adanya ruangan dan bangku-bangku yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu pula, sarana pendidikan keterampilan jahit menjahit hanya memiliki empat buah mesin jahit saja. Meskipun fasilitas lapangan olahraga telah disediakan, namun pemanfaatannya masih jarang digunakan karena minimnya alat-alat perlengkapan olahraga, alat-alat perlengkapan olahraga yang tersedia hanyalah untuk olahraga bola voli, tenis meja, catur, dan futsal. Sarana perpustakaan seperti buku-buku bacaan yang tersedia juga dinilai masih kurang. Keterbatasan ruangan perpustakaan juga dirasa masih kurang dimana ruang aula yang digunakan untuk ruang kunjungan keluarga, ruang sidang PB dan CB, sekaligus juga difungsikan sebagai ruang baca atau ruang perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terlalu banyak kegiatan yang dilaksanakan di ruang aula, hingga terkadang pemakaian ruang aula mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan yang lain, karena minimnya ruangan yang ada.

2. Anggaran

Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran dalam membiayai instansi-instansi pemerintah sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran pendidikan dan

pengajaran Narapidana, baik itu pendidikan dan pengajaran yang dilakukan melalui program pembinaan dan pelatihan. Agar program pendidikan dan pengajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak mengalami hambatan perlu adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam kegiatan tersebut.

3. Pegawai / Tenaga Pendidik

Pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, dan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS, dilaksanakan oleh pembina pemasyarakatan yang mana dia dibebani tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran di LAPAS. Latar belakang pegawai lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki background sarjana pendidikan mengakibatkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan tidak sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah umum, LAPAS juga tidak memiliki kurikulum tersendiri dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengakibatkan pelaksanaannya berlangsung tidak maksimal.

4. Kurangnya Mitra Kerja

Kurangnya mitra kerja dalam upaya untuk melakukan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga

Pemasyarakatan Jombang. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal penyediaan tenaga pendidik berkaitan dengan pemenuhan pendidikan intelektual bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Serta instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pelaksanaan pelatihan keterampilan. Apabila semakin banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran ini, maka Lembaga Pemasyarakatan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan hak tersebut.

E. Implementasi Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ditujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut berguna untuk mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri mereka, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : ⁹⁶

Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

⁹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Serta dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :⁹⁷

Setiap Warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Hal ini mengindikasikan bahwa dimanapun, kapanpun, dan siapapun mereka, tidak ada pembedaan sikap dan perlakuan berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk juga individu yang sedang menjalani masa peminatannya di dalam Lembaga Masyarakat.

Bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga Masyarakat termasuk dalam kategori pendidikan non formal. Pendidikan ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.⁹⁸

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Pendidikan kepemudaan bertujuan untuk mempersiapkan

⁹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁹⁸ Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kader pemimpin-pemimpin bangsa, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi pemuda, pecinta alam, palang merah, dan lain sebagainya. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA.

Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan juga satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan juga termasuk dalam kategori pendidikan non formal, yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan / atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan intelektual, lembaga pemasyarakatan melaksanakan dalam bentuk pemberian kursus yang memuat materi membaca, menulis, dan berhitung yang diperuntukkan bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana yang buta huruf. Sedangkan untuk program kesetaraan, lembaga memberikan izin kepada anak didik pemasyarakatan untuk mengikuti program kesetaraan di luar lembaga dengan pengawasan petugas / staff pemasyarakatan, pendidikan kesetaraan tersebut biasanya dilaksanakan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat di daerah jombang setempat.

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran didalamnya harus terdapat sebuah kurikulum yang berisi rencana, isi, dan bahan pelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, hal inilah yang tidak ditemui di dalam lembaga masyarakat. Padahal semestinya kurikulum disusun dan diciptakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Alangkah baiknya jika hal ini diterapkan di lembaga masyarakat, lembaga masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten jombang untuk menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lembaga masyarakat. apabila hal ini dilakukan, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga masyarakat akan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu narapidana akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Pasal 36 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :⁹⁹

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a. peningkatan iman dan takwa
- b. peningkatan akhlak mulia
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f. tuntutan dunia kerja
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

⁹⁹ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- h. agama
- i. dinamika perkembangan global, dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Semestinya apa yang telah tercantum dalam isi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat dijadikan acuan khususnya bagi pihak lembaga pemasyarakatan jombang bersama dinas pendidikan kabupaten jombang dalam menyusun kurikulum pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat bagi narapidana untuk menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, lembaga pemasyarakatan melaksanakan serangkaian program pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi yang berguna bagi diri narapidana tersebut.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan diberikan hak atas pembinaan rohani dan jasmani serta hak-hak untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pendidikan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pancasila,

anatar lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.¹⁰⁰

Dalam Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : ¹⁰¹

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sesuai dengan sebagaimana yang telah diamantkan dalam bunyi pasal di atas lembaga pemasyarakatan jombang sudah melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, yaitu melalui program pembimbingan, terdapat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani dan, pendidikan seni dan budaya, serta pendidikan bahasa indonesia dan matematika. Sedangkan melalui program pelatihan lembaga melaksanakan pelatihan keterampilan jahit menjahit, dan pertukangan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa :

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

¹⁰⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Jombang dalam memberikan bimbingan keagamaan telah menyediakan sejumlah petugas yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan bimbingan keagamaan tersebut, serta dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan pihak LAPAS menjalin kerjasama dengan ustadz “mbah bolong” / KH. Nur Hadi untuk memberikan ceramah agama bagi warga binaan yang beragama islam dan juga pendeta di daerah setempat terkait dengan dilaksanakannya kebaktian di gereja LAPAS bagi warga binaan yang beragama nasrani.

F. Implementasi Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum

Jika mengacu pada teori efektivitas hukum yang menyebutkan bahwa efektivitas suatu peraturan harus ada integrasi diantara ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.¹⁰²

Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, dalam hal ini adalah Petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jombang, yang dalam pelaksanaan tugasnya belum melaksanakan penerapan hak pendidikan dan pengajaran di LP dengan maksimal, karena tidak berlatar belakang sarjana pendidikan, serta petugas LP kurang melaksanakan tugas pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebabkan pembinaan tidak dilakukan

¹⁰² Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers. Hal. 62.

secara maksimal, yakni masih kurangnya kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan di Bengkel Kerja LAPAS.

Substansi adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : ¹⁰³

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadikan seseorang menjadi lebih jahat lagi atau bahkan menjadi seseorang yang lebih baik masih banyaknya mantan Narapidana yang kembali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Jombang menyebabkan tujuan dari sistem pemasyarakatan belum dapat terwujud.

Budaya hukum (*Culture*) menunjukkan adanya kepandaian, hukum, moral, dan termasuk kepercayaan. Stigma masyarakat yang cenderung tidak percaya terhadap mantan Narapidana sulit untuk diubah, sehingga mantan Narapidana tersebut kesulitan untuk hidup di luar LAPAS dan pada akhirnya lebih memilih untuk kembali ke dalam LAPAS.

Ketiga elemen hukum tersebut, baik struktur hukum, substansi hukum, dan kultur / budaya hukum belum dapat dapat terpenuhi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Jombang belum efektif. Relevan dengan teori efektivitas hukum,

¹⁰³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita mengatakan : ¹⁰⁴“Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) semata, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena kesemua faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Narapidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana, namun mereka tetap mempunyai hak yang wajib mereka dapatkan serta wajib dihormati oleh siapapun.¹⁰⁵ Dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan adalah mentaati segala peraturan yang berlaku selama mereka berada LAPAS, sementara hak-hak mereka antara lain, hak mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Dilaksanakannya program pendidikan dan pengajaran kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri, dimana

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandarmaju. Hal. 55.

¹⁰⁵ Mangasa Sidabutar. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 17.

diharapkan mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar, baik, dan bertanggung jawab sesudah mereka menjalani proses pembinaan di LAPAS dan telah dinyatakan bebas nantinya.

